

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional, pemerintah memberikan perhatian yang sebesar-besarnya pada pembangunan di pedesaan. Perhatian yang besar terhadap pedesaan itu didasarkan pada kenyataan bahwa desa merupakan tempat beredarnya sebagian besar rakyat Indonesia. Kedudukan desa dan masyarakat desa merupakan dasar landasan kehidupan bangsa dan negara Indonesia.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum terkecil yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh negara. Pembangunan pedesaan selanjutnya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pemberdayaan masyarakat pedesaan dapat dilihat pula sebagai upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memberdayakan masyarakat, dan upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh. Pembangunan pedesaan bersifat multiaspek, oleh karena itu perlu keterkaitan dengan bidang sektor dan aspek di luar pedesaan sehingga dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi pembangunan nasional.

Pemerintah dan rakyat Indonesia saat ini dalam masa pembangunan, bertujuan untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional yaitu mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus meningkat dan berubah kearah yang lebih baik melalui pelaksanaan program-program pembangunan ekonomi masyarakat petani. Jika dikaitkan dengan jumlah penduduk Indonesia, mayoritas yaitu hampir 80% berada di pedesaan maka sudah sepatutnya usaha untuk peningkatan pembangunan ekonomi masyarakat petani perlu mendapat prioritas utama di dalam meningkatkan desa menjadi desa yang diinginkan dan dicita-citakan demi menuju desa yang sejahtera.

Sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 18 Tahun 1945, pemerintah daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peran pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan perekonomian dalam pelayanan dan pemberdayaan kepada masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, keistimewaan dan kekuasaan serta potensi dan keanekaragaman dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepala desa sebagai pemimpin dalam suatu desa mempunyai tugas dan tanggung jawab melayani urusan pemerintahan, pembangunan, ekonomi, dan kemasyarakatan di desanya demi menuju desa yang maju. Dalam pemerintahan daerah kabupaten dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa. Badan permusyawaratan desa berfungsi untuk menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan mengeluarkan aspirasi dari rakyat desa.

Selain Badan Permasyarakatan Desa, ada juga Koperasi Unit Desa. Sesuai dengan ketetapan TAP MPR No. II/MPR/1983 dalam GBHN disebutkan bahwa : dalam melaksanakan pembinaan koperasi yang diutamakan adalah Koperasi Unit Desa dan koperasi primer lainnya. Perlu pula dilanjutkan pula pembinaan koperasi fungsional seperti buruh dan kopersai perusahaan, koperasi pegawai negeri, mahasiswa dan sebagainya sehingga koperasi semakin memasyarakat dan membudaya. Dari apa yang disebutkan ini menunjukkan bahwa peranan koperasi menjadi sangat vital terutama KUD. Sebab KUD berada di desa yang sampai sekarang merupakan basis terbanyak yang menyangkut keberadaan masyarakat desa.

Berdasarkan uraian di atas bahwa penelitian tentang peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani di desa Kentara Kecamatan Laeparira Kabupaten Dairi, terasa perlu untuk diteliti,

bagaimana upaya kepala desa dalam melaksanakan pembangunan perekonomian desa Kentara kemudian menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Peran Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Di Desa Kentara Kecamatan Laeparira Kabupaten Dairi”**.

B. Identifikasi Masalah

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah sebelumnya, agar tidak terjadi kesalah pahaman maka perlu di identifikasi masalah terkait dengan judul diatas adalah sebagai berikut :

1. Peran pemerintahan desa dalam meningkatkan kesejahteraan petani.
2. Bentuk peran pemerintahan desa dalam meningkatkan kesejahteraan desa.
3. Upaya-upaya pemerintahan desa dalam meningkatkan kesejahteraan petani desa.

C. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari pemahaman yang terlalu luas dalam penelitian ini, maka perlu kiranya menentukan pembatasan masalah pada hal-hal yang pokok saja untuk mempertegas sasaran yang akan dicapai yaitu untuk mengetahui Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Desa Kentara Kecamatan Laeparira Kabupaten Dairi.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran pemerintahan desa dalam meningkatkan kesejahteraan petani di desa Kentara Kecamatan Laeparira Kabupaten Dairi?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hal yang paling penting untuk dirumuskan dalam suatu kegiatan agar pelaksanaan penelitian ini mencapai tujuan yang diinginkan, penentuan tujuan penelitian berfungsi untuk menentukan arah yang tepat bagi peneliti untuk menghindari kesulitan-kesulitan yang mungkin akan terjadi dalam proses penelitian.

Mengingat pentingnya suatu tujuan penelitian, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui gambaran faktual tentang peran pemerintahan desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani di desa Kentara Kecamatan Laeparira Kabupaten Dairi
2. Bagaimana persepsi masyarakat Desa terhadap peran yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani di Desa Kentara.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Hasil dalam penelitian ini diharapkan berguna sebagai salah satu referensi dalam meningkatkan kesejahteraan petani, khususnya pembangunan di Wilayah Kecamatan Laeparira

2. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian diharapkan bermanfaat untuk memperkaya ilmu pengetahuan di bidang ilmu pemerintahan dengan berlakunya otonomi daerah, khususnya pada pemerintahan Desa.

3. Manfaat Akademik

Merupakan satu persyaratan untuk mencapai kebulatan Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan.